

**KONSEKUENSI SOSIAL DALAM DUALISME
KEWENANGAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN
PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
ANTARA BP BATAM DENGAN PEMKO BATAM**

SKRIPSI

Oleh



JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

ABSTRAK

M. Rivky Putra P G, BP. 1410812006, Konsekuensi Sosial dalam Dualisme Kewenangan Pelayanan Pertanahan dan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Antara BP Batam dengan Pemko Batam, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2019. Pembimbing I: Drs. Ardi Abbas, MT, dan Pembimbing II: Machdaliza Masri, S.H, M.Si. Jumlah halaman: 166 halaman.

Kota Batam memiliki dua lembaga yang memiliki otoritas dalam pengelolaannya, yaitu Otorita Batam yang sejak tahun 2007 berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam. Akibatnya, terjadi dualisme dalam pengelolaan wilayah Batam khususnya dalam pelayanan pertanahan dan pengendalian pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsekuensi sosial dalam dualisme kewenangan pelayanan pertanahan dan pengendalian pembangunan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis Studi Kasus Robert K. Yin. Teori yang dipakai adalah Strukturasi menurut Anthony Giddens.

Teori strukturasi membahas tentang struktur sebagai hambatan namun juga membebaskan. Dalam strukturasi, diproduksi sistem sosial dan mereproduksi tindakan-tindakan sebagai konsekuensi yang tidak disengaja. Selain itu, teori ini juga membahas kontradiksi dalam praktik sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi sosial dari dualisme kewenangan di wilayah Batam dalam pelayanan pertanahan menimbulkan beban ganda yang tinggi, proses pelayanan yang tidak efisien, dan munculnya jasa perwakilan pengurusan. Dalam bidang pengendalian pembangunan menimbulkan rumah liar, adanya spekulasi lahan dan daya saing Kota Batam turun. Kesimpulan peneliti adalah terjadinya dualitas struktur antara masyarakat Batam dengan BP dan Pemko selaku pembuat struktur, sehingga dalam dualitas struktur terjadi konsekuensi yang tidak disengaja dalam praktik sosialnya. Masing-masingnya memiliki kontradiksi primer dan sekunder sehingga kedua kubu saling bersitegang di ranah pelayanan publik namun di sisi lain tetap saling membutuhkan.

Kata Kunci: Dualisme, Konsekuensi, Kontradiksi, Struktur.

ABSTRACT

M. Rivky Putra P G, BP. 1410812006, Social Consequences in Dualism of the Land Services Authority and Development Control Planning between BP Batam and the Local Government of Batam City, Departement of Sociology, Faculty of Political and Social Science, Andalas University, Padang, 2019. Advisor I: Drs. Ardi Abbas, MT, and Advisor II: Machdaliza Masri, S.H, M.Si. Number of pages: 166 pages.

Batam City has two institutions that have authority in its management, namely the Batam Authority, which since 2007 has changed its name to the Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) and the Local Government of Batam City. Which resulted a dualism in the authority of the Batam area specifically in land services and development control planning.

This research aims to describe the social consequences in the dualism of the authority of land services and development control by using qualitative research methods in a descriptive type. Data collection techniques used by researchers are observation, in-depth interviews, and documentation. In selecting research informants, researchers used purposive sampling techniques. The data obtained were analyzed by analysis of Robert K. Yin's Case Study. The theory used is structuration according to Anthony Giddens.

Structuration theory discusses structure as an obstaining but also enabling. In structuration, social systems are produced and reproduces actions as unintended consequences. in addition, this theory also discusses the contradictions in social practice.

The results of this research shows that the social consequences of dualism of authority in the Batam region in land services pose a high double burden, inefficient service processes, and the emergence of service representation. In the development control planning section result the wild houses, the existence of land speculators and the competitiveness of Batam City have declined. The conclusion from researcher is the occurrence of structural duality between the people of Batam with BP and Pemko as the structure maker, so that in duality of structure there are unintended consequences in social practice. Each has a primary and secondary contradiction so that the two camps clash with each other in the realm of public service but on the other hand still need each other.

Keywords: Dualism, Consequences, Contradiction, Structure.